

## **Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara**

### ***Analysis Of The Application Of Paymentaccounting Information System At The National Land Agency Of North Sulawesi Province***

**Lifry Corry Ertavina<sup>1</sup>, Hendrik Manossoh<sup>2</sup>, Hendrik Gamaliel<sup>3</sup>**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus  
Bahu, Manado, 95115, Indonesia

e-mail.com; [lifrygimon12@gmail.com](mailto:lifrygimon12@gmail.com)<sup>1</sup>, [hendrik\\_manossoh@unsrat.ac.id](mailto:hendrik_manossoh@unsrat.ac.id)<sup>2</sup>,  
[hendrik\\_gamaliel@unsrat.ac.id](mailto:hendrik_gamaliel@unsrat.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak:** Sistem Informasi Akuntansi Penggajian adalah suatu sistem yang dibuat untuk mempermudah dalam pelaksanaan penggajian terhadap pegawai yang ada dengan tepat dan akurat. Sistem akuntansi penggajian mempunyai peranan penting bagi setiap perusahaan atau instansi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penggajian untuk proses penggajian yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Jenis data yang digunakan yaitu data primer atau data non-numerik seperti hasil wawancara mengenai sistem informasi akuntansi penggajian pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu dengan cara mendeskripsikan sistem informasi akuntansi penggajian yang ada pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara yang meliputi aktivitas-aktivitas dalam sistem penggajian, dokumen yang digunakan, laporan yang dihasilkan dan fungsi – fungsi yang terkait dengan sistem informasi akuntansi penggajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi penggajian pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara sudah cukup baik karena sudah sesuai dengan teori yang ada seperti dokumen yang digunakan dan prosedur yang digunakan. Sedangkan kelemahannya ada pada fungsi yang terkait dalam hal ini ditandai dengan adanya perangkap tugas pada bagian kepegawaian, sehingga kemungkinan bisa terjadi penyelewengan atau kesalahan dalam proses penggajian.

**Kata kunci:** Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Akuntansi Penggajian, Sistem Pengendalian Internal

**Abstract:** *Payroll Accounting Information System is a system created to facilitate the implementation of payroll for existing employees precisely and accurately. Payroll accounting system has an important role for every company or agency. The purpose of this study is to find out how the implementaion of the payroll acoounting information system fo the payroll process is carried out by the National Land Agency of North sulawesi Province. The type of data used is primary data or non-unrumeric data such as the results of interviews about accounting information systems and internal control systems that are implemented at the National Land Agency of North Sulawesi Province. The analysis technique used in this research is descriptive analysis, namely by describing the payroll accounting information sysyem that exists at the National Land Agency of North Sulawesi Province which includes activities in thev payroll system, documents used, reports generated and related functions with payroll accounting information system. The result of study show that the implementaion of the payroll accounting information system at the National Land Agency of North Sulawesi Province is quite good because it is an accordance with existing theoris such as the documents used and the procedures used. While the weekness lies the related functions, in this case it is characterized by the existance of double duties oh the staffing section, so that there is a possibility of fraud or errors in the payroll process..*

**Keyword :** *Accounting Information System, Payroll Accounting Systems, Internal Control Systems*

#### **PENDAHULUAN**

Dalam setiap entitas/perusahaan, akuntansi memegang peran yang sangat penting karena fungsi akuntansi dapat memberikan informasi mengenai keuangan suatu dari suatu instansi/perusahaan. Setiap organisasi, instansi atau perusahaan harus dikelola dengan baik agar tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Sistem akuntansi penggajian dirancang untuk menangani transaksi perhitungan gaji dan karyawan dan pembayarannya. Sistem ini terdiri dari jaringan prosedur yaitu prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pembuatan daftar gaji, prosedur distribusi biaya gaji, prosedur pembuatan bukti kas keluar, dan prosedur pembayaran gaji. Pentingnya sistem pengendalian internal dalam penggajian dan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong

dipatuhinya kebijakan manajemen. Adanya penetapan tentang peraturan yang berhubungan dengan penggajian dari pemerintah agar lebih memperhatikan penentuan tarif gaji sehingga dapat menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan khususnya bagi perusahaan atau instansi pemerintahan yang mempunyai tenaga kerja yang dalam jumlah besar, maka pembayaran gaji di dalamnya harus diawasi.

Pencatatan absensi pegawai merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Informasi yang dalam dan terperinci mengenai kehadiran pegawai dapat menentukan prestasi kerja seseorang, gaji atau upah, produktivitas, dan kemajuan instansi. Kemudian, pada alat pencatat absensi yang konvensional memerlukan banyak intervensi pegawai bagian administrasi sumber daya manusia maupun kejujuran seorang pegawai yang sedang dicatat kehadirannya. Hal ini sering memberikan peluang untuk dapat memanipulasi data kehadiran apabila pengawasan tidak dilakukan dengan semestinya. Fenomena yang di hadapi oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara yaitu seperti pencatatan kehadiran (Absensi). Ada beberapa pegawai yang manual tetapi pegawai tersebut tidak absen melalui fingerprint dan juga masih ada pegawai yang terlambat dalam kehadirannya sehingga menyebabkan ketidakdisiplinan pegawai tersebut dalam jam kehadirannya. Sistem penggajian pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara saat ini sudah terkomputerisasi sesuai dengan perkembangan zaman yang ada sekarang. Berbeda dengan pada saat awal berdirinya instansi yang masih menggunakan sistem manual.

Pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara yang masih menerapkan sistem penggajian hanya masih menggunakan aplikasi *microsoft word* dan *microsoft excel* dalam proses penggajian pegawai sampai dengan proses laporan penggajian. Keuntungan suatu instansi/perusahaan tidak lepas dari adanya dukungan sumber daya manusia dalam perusahaan, keterlibatan pegawai dalam suatu instansi/perusahaan mulai dari awal kegiatan yaitu menyusun dan merencanakan tujuan instansi/perusahaan yang akan dicapai baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang, melaksanakan kegiatan operasional instansi/perusahaan sampai pada tercapainya tujuan. Sumber daya manusia yang tidak memadai juga dapat menghambat proses pengolahan data penggajian pegawai karena sumber daya manusia memiliki peran penting dalam untuk kemajuan suatu instansi/perusahaan, keterbatasan manusia seperti kelelahan fisik, faktor usia, keterbatasan kemampuan untuk melakukan perhitungan dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banyak kesalahan, pengolahan data yang masih menggunakan aplikasi *microsoft word/excel* juga tidak mendukung kecepatan dan ketepatan dalam proses perhitungan gaji dan pelaporan data gaji. Penerapan sistem akuntansi penggajian terkomputerisasi akan membantu meringankan tugas bagian keuangan di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu, sistem akuntansi penggajian terkomputerisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan mampu mengatasi kelemahan-kelemahan yang terjadi pada sistem penggajian secara manual. Dengan sistem akuntansi penggajian terkomputerisasi, semua hal yang berhubungan dengan penggajian dapat ditangani dengan menggunakan komputer seperti: presensi, rekap presensi, pembuatan laporan penggajian, dan pengelolaan data karyawan yang terdapat dalam sistem akuntansi penggajian di instansi/perusahaan yang terkait..

Sistem akuntansi memiliki peran penting dalam suatu perusahaan karena sistem ini sangat diperlukan untuk menganalisis transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh instansi. Mulyadi (2016 : 3), menyatakan bahwa sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan instansi.

Suatu Perusahaan membuat sistem akuntansi yang berguna untuk pihak intern ataupun pihak eksteren perusahaan. Tujuan umum dari pengembangan sesuai dengan sistem akuntansi menurut (Mulyadi, 2013 : 19), yaitu:

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru.
2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada.
3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern.
4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

Mulyadi (2001 : 5), menyatakan bahwa “Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok instansi”. Romney dan Steinbart (2006 : 2 ), menyatakan bahwa “Sistem adalah merupakan dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai satu tujuan”.

- a. Romney dan Steinbart (2016 : 3 ), menyatakan bahwa fungsi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah :
  1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas tersebut, agar pihak instansi, para pegawai, dan pihak lainnya yang berkepentingan dapat meninjau ulang hal-hal yang telah terjadi.
  2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna, bagi pihak instansi untuk mengambil keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
  3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi, termasuk data, untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia pada saat dibutuhkan, akurat, handal.
- b. Romney dan Steinbart (2016 : 10), menyatakan bahwa manfaat Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah :
  1. Mempunyai kualitas dan mengurangi biaya untuk menghasilkan produk atau jasa. Contoh, sistem informasi akuntansi dapat mengawasi mesin yang digunakan sehingga operatornya akan diberitahukan dengan segera saat memproses yang berjalan keluar dari batas yang diinginkan.
  2. Memperbaiki efisiensi, sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik dapat membantu memperbaiki efisiensi jalannya suatu proses dengan memberikan informasi yang lebih tepat waktu.
  3. Memperbaiki pengambilan keputusan, sistem informasi akuntansi dapat memperbaiki pengambilan keputusan dengan memberikan informasi yang lebih akurat.
  4. Berbagai pengetahuan, sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik biasanya mempermudah proses berbagai pengetahuan dan keahlian selanjutnya dapat memperbaiki proses operasi perusahaan, dan bahkan memberikan keunggulan kompetitif.

Sistem informasi akuntansi penggajian adalah fungsi, dokumen, catatan dan sistem pengendalian intern yang digunakan untuk kepentingan harga pokok produk dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja ( Mulyadi, 2016 : 373). Sistem informasi akuntansi penggajian untuk kebanyakan perusahaan atau instansi yaitu suatu sistem, prosedur dan catatan atau formulir yang digunakan untuk menetapkan secara tepat dan akurat berapa gaji yang harus diterima oleh setiap pegawainya, berupa gaji yang harus dipotong, misalnya untuk pajak penghasilan pegawai dan lainnya. Sistem akuntansi penggajian diselenggarakan untuk menetapkan, menerapkan, mengevaluasi pengawasan serta pembayaran yang tepat yang digunakan oleh pimpinan sebagai informasi untuk mengambil keputusan dan kebijaksanaan yang dianggap perlu.

Tujuan sistem akuntansi penggajian adalah untuk menjamin bahwa status, tarif gaji dan pemotongan gaji karyawan telah diotorisasi, bahwa pembangunan gaji atas jasa-jasa nyata hasil kerja pegawai telah diotorisasi dan bahwa biaya-biaya tenaga kerja telah dicatat, diklasifikasikan, diikhtisarkan dan dilaporkan secara akurat dan secepatnya.

Prosedur merupakan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, prosedur biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen. Prosedur ini dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Sistem penggajian terdiri dari jaringan prosedur sebagai berikut Prosedur pencatat waktu hadir ; Prosedur pembuatan daftar gaji; Prosedur distribusi biaya gaji ; Prosedur pembuatan bukti kas keluar ; Prosedur pembayaran gaji

Menurut Mulyadi (2017:163), bahwa fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian adalah sebagai berikut Fungsi Kepegawaian ; Fungsi Pencatat Waktu ; Fungsi Pembuat Daftar Gaji ; Fungsi Akuntansi ; Bagian Hutang ; Bagian Kartu Biaya ; Bagian Jurnal ; Fungsi Keuangan

Menurut Mulyadi ( 2016 : 163), dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian adalah sebagai berikut Dokumen Pendukung Perubahan Gaji ; Kartu Jam Hadir ; Kartu Jam kerja ; Daftar Gaji ; Rekap Daftar Gaji ; Bukti Kas Keluar

Sebagai salah satu bidang ilmu akuntansi, definisi akuntansi pemerintahan tidak akan terlepas dari pemahaman tentang akuntansi itu sendiri, termasuk perkembangannya. Akuntansi pemerintahan bersangkutan dengan bidang keuangan negara dari anggaran, sampai dengan pelaksanaan dan pelaporan, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkan. Akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktifitas pemberian jasa

untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah, serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menajamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Pengendalian internal dilakukan untuk memanytau apakah kegiatan operasional maupun *financial* perusahaan telah berjalan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen.

Pengendalian internal menurut COSO adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris perusahaan, manajemen dan personil lainnya, diterapkan dalam penetapan strategi yang meliputi keseluruhan perusahaan yang dirancang untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang mungkin akan mempengaruhi organisasi dan mengelola perusahaan sesuai dengan *risk appetite* perusahaan untuk menyediakan keyakinan yang memadai terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

### Penelitian Terdahulu

Putra (2015) Tentang Analisis Sistem dan Pengendalian Internal Pembayaran Gaji dan Upah Karyawan Pada PT Bara Dinamika Muda Sukses Di Malinau. Hasil penelitian ini diketahui pengendalian intern yang diterapkan perusahaan sebelumnya memenuhi unsur-unsur pengendalian internal. Baik dari segi struktur organisasi dan system otorisasi dan prosedur pencatatan.

Fibriyanti (2017) Tentang Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dalam Rangka Efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Populer Sarana Medika, Surabaya). Hasil penelitian menemukan bukti bahwa Bagian Akuntansi masih bertanggungjawab dalam pembayaran gaji dan upah karyawan serta masih bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap pengisian daftar hadir karyawan dan membuat rekap daftar hadir karyawan sehingga memungkinkan adanya penyelewengan. Praktek yang sehat yang diterapkan untuk mendukung efektifitas pengendalian intern adalah gaji pokok karyawan dibayarkan dengan mentransfer gaji pokok ke rekening masing – masingkaryawan oleh direktur dan slip gaji dibuat rangkap dua.

Silalahi (2019) Tentang Peranan Sistem Informasi Akuntansi Pemggajian Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Penggajian Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai. hasil penelitian yang penulis lakukan, ternyata Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai telah menerapkan sistem informasi akuntansi penggajian dengan memadai, hal ini terlihat dari kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, yaitu terdiri dari unsur-unsur sistem informasi akuntansi seperti adanya tujuan, masukan, keluaran, penyimpanan data, pengolahan, instruksi dan prosedur, pengguna, pengendalian dan pengukuran keamanan, sehingga dapat menunjang keefektivitas pengendalian internal penggajian yaitu: (1) Lingkungan pengendalian, (2) Penetapan resiko, (3) Aktivitas pengendalian, (4) Informasi dan komunikasi, (5) Pemantauan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi gaji yang memadai dapat menunjang keefektivitas pengendalian internal penggajian.

### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Tempat pelaksanaan penelitian ini pada kantor Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, yang beralamat di Jalan 17 Agustus, Manado. Waktu penelitian yaitu dimulai dari bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.

**Jenis Data.** Data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kata atau kalimat, bukan dalam bentuk bilangan atau angka.

**Sumber Data.** Data primer merupakan sejumlah data yang akan didapatkan dari sumber asli atau real dari objek penelitian, yaitu berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber terhadap Kepala Bagian Keuangan dan pada bagian sub kepegawaian.

**Metode Pengumpulan Data.** 1. Wawancara, dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada narasumber dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Wawancara yang dilaksanakan

menggunakan metode wawancara bebas. Dimana peneliti bebas menanyakan apa saja namun tetap memperhatikan kaitan pertanyaan dengan data yang diperlukan. Sehingga hasil yang didapatkan sesuai dengan yang terjadi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara tanpa ada penambahan dan pengurangan dari narasumber. 2. Dokumentasi, yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dan catatan-catatan dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara yang dibutuhkan selama penelitian. 3. Observasi, suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung pada objek penelitian. Objek penelitian pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.

### **3.4 Metode dan Proses Analisis**

1. Menganalisis dan Mengidentifikasi data-data yang didapat ataupun di peroleh di Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.
2. Mendeskripsikan siklus struktur organisasi sistem akuntansi penggajian dan analisis dokumen, catatan akuntansi, fungsi dan prosedur terkait penggajian dan pengupahan yang digunakan di dalam Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.
3. Mencari permasalahan ataupun kendala yang ada dalam proses penggajian dan pengupahan.
4. Menarik kesimpulan atas hasil analisis gaji dan memberikan saran pada Kawakil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Hasil Penelitian**

#### **4.1.1 Fungsi-fungsi Yang Terkait Dalam Proses Penggajian**

Pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, terdapat beberapa fungsi yang terkait dalam proses penggajian, antara lain :

- a. Fungsi kepegawaian
- b. Fungsi Pencatat Waktu
- c. Fungsi Pembuat Daftar Gaji
- d. Fungsi Keuangan

#### **4.1.2 Dokumen Yang Digunakan Dalam Proses Penggajian**

- a. Daftar Hadir Karyawan
- b. Rekap Daftar Hadir Karyawan
- c. Daftar Gaji Karyawan
- d. Bukti Kas Keluar
- e. Bukti Transfer

#### **4.1.3 Prosedur Yang Membentuk Sistem Penggajian Pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.**

Adapun jaringan prosedur yang membentuk sistem penggajian pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

- a. Prosedur Pencatatan Waktu Hadir
- b. Prosedur Pembuatan Daftar Gaji
- c. Prosedur Pembayaran Gaji

#### **4.1.4 Pengendalian Internal Dalam Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.**

1. Organisasi
2. Sistem Otorisasi
3. Praktik Yang Sehat

### **4.2 Pembahasan**

#### **4.2.1 Fungsi Yang Terkait Dalam Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.**

Fungsi kepegawaian pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara ini berfungsi untuk mencari karyawan baru, menyeleksi para calon pegawai, mengatur penempatan untuk pegawai baru, penempatan jabatan beserta dengan golongan gaji, ataupun mutasi pegawai atau pemberhentian pegawai. Selain dari pada itu, pada bagian kepegawaian ini terdapat data-data yang terkait dengan jumlah pegawai dan jam kerja pegawai yang diketahui melalui absensi dan *fingerprnt* dari setiap pegawai sehingga yang membuat rekapan absen pegawai adalah bagian kepegawaian ini yang nantinya akan dipakai untuk bahan

dasar pembuatan daftar gaji pegawai.

Fungsi pencatatan waktu ini bertanggung jawab untuk mengatur kehadiran semua pegawai yang menggunakan fingerprint atau manual. Dalam bagian ini yang melakukan pencatatan waktu hadir ini adalah bagian kepegawaian.

Fungsi pembuat daftar gaji bertanggung jawab dalam hal membuat daftar gaji yang dalam daftar tersebut terdapat berbagai potongan yang ada seperti BPJS, keterlambatan, dan ketidakhadiran atau lainnya yang dilakukan oleh bagian kepegawaian. Dalam hal ini telah terjadi kerangkapan tugas yang telah dilakukan oleh bagian kepegawaian.

Fungsi keuangan disini bertugas untuk memeriksa daftar hadir pegawai, daftar gaji pegawai, lembar penerimaan gaji, dan juga bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi-transaksi yang terkait dengan penggajian.

Berdasarkan dengan teori yang ada fungsi- fungsi dalam sistem informasi akuntansi penggajian ada 8 fungsi yang terkait , tetapi pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara hanya menggunakan 4 fungsi yang terkait. Perbandingan dengan hasil penelitian terdahulu Fibriyanti adalah fungsi- fungsi yang terkait dengan sistem informasi akuntansi telah melakukan tugas fungsinya masing-masing dan pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara masih terjadinya perangkapan tugas pada fungsi-fungsi yang ada.

Deskripsi dari hasil penelitian pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara belum bisa dikatakan sempurna karena tidak ada pemisahan tugas antara bagian menginput data gaji dan yang mengolah data gaji. Yang dimana fungsi dari pembuat daftar hadir pegawai dilakukan oleh bagian kepegawaian, namun bagian kepegawaian ini juga yang melakukan perhitungan dan pembuatan gaji, yang pada dasarnya pembuatan daftar gaji ini dilakukan oleh fungsi keuangan, maka terjadi perangkapan tugas yang dilakukan.

#### **4.2.2 Dokumen Yang Terkait Dalam Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.**

Berdasarkan yang kita lihat dari hasil analisis di atas, dokumen informasi yang digunakan dalam proses penggajian tidak sesuai dengan prosedur yang ada, karena dokumen yang dihasilkan oleh instansi tidak lengkap dan tidak sesuai dengan teori sistem akuntansi penggajian. Dalam proses penggajian tersebut ada beberapa dokumen yang tidak ada yaitu amplop gaji, dokumen perubahan gaji dan pernyataan gaji hal ini dikarenakan pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara berbeda dengan sistem yang ada. Berbeda dengan penelitian terdahulu adalah dokumen yang digunakan masih terdapat ada amplop gaji dikarenakan masih menggunakan sistem penggajian manual. Pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara hanya slip gaji dan bukti transfer langsung yang diberikan kepada setiap pegawai yang dilakukan oleh bagian keuangan.

#### **4.2.3 Prosedur Yang Membentuk Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.**

Dari hasil penelitian pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara bisa belum sepenuhnya sesuai dengan teori yang ada. Ini dikarenakan terdapat 2 prosedur yang tidak digunakan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara yaitu prosedur distribusi biaya gaji dan prosedur pembuatan bukti kas keluar. Berdasarkan dengan penelitian terdahulu terjadi masalah yang sama dalam prosedur penggajian yaitu tidak menggunakan 2 teori yang ada yang sesuai dengan teori.

Prosedur pembuatan daftar gaji pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara belum dilakukan dengan benar, karena masih terdapat perangkapan tugas yang dilakukan oleh fungsi pencatatan waktu dan fungsi pembuat daftar gaji, yang pada dasarnya seharusnya pembuat daftar gaji dibuat oleh fungsi keuangan.

#### **4.2.4 Analisis Pengendalian Internal Penggajian Pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.**

Dari hasil penelitian unsur-unsur pengendalian internal yang ada pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara bahwa belum bisa dikatakan sempurna karena tidak adanya pemisahan tugas antara bagian yang menginput data gaji dengan yang mengolah data gaji. Yang dimana pada dasarnya fungsi pembuat daftar hadir pegawai dilakukan oleh bagian kepegawaian, tetapi bagian kepegawaian ini juga yang melakukan perhitungan dan pembuatan daftar gaji jadi terjadinya adanya perangkapan tugas.

Fungsi keuangan juga telah dijalankan dengan baik yaitu bertugas untuk bertanggung jawab untuk memberikan gaji lewat bank rekening kepada masing-masing -pegawai. Sistem otoritas juga yang ada pada

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara masih bisa dikatakan belum berjalan dengan efektif karena masih terdapat adanya perbedaan antara absen manual dan juga absen *fingerprnt*, dan masih terdapat pegawai yang kurang disiplin dalam kehadiran contohnya seperti keterlambatan kehadiran.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan analisis penerapan sistem informasi akuntansi penggajian pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara dapat disimpulkan :

1. Fungsi sistem informasi akuntansi Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara belum bisa dikatakan baik karena terjadi perangkapan tugas pada fungsi kepegawaian yaitu sebagai pencatat waktu hadir tetapi juga sebagai pembuat daftar gaji.
2. Dokumen yang digunakan pada sistem penggajian pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara sudah cukup baik karena sudah cukup memenuhi dengan teori yang ada.
3. Prosedur penggajian yang digunakan pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara belum bisa dikatakan efektif dikarenakan belum sepenuhnya menggunakan sesuai dengan teori yang ada.
4. Penerapan pengendalian internal pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara belum efektif karena brlum adanya pemisahan tugas dari setiap fungsi- fungsi yang terkait.
5. Sistem informasi akuntansi penggajian pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara sudah bisa dikatakan baik tetapi juga masih ada kelemahan diantara lain pada fungsi yang terkait masih terjadi perangkapan tugas, dokumen yang digunakan dalam proses penggajian tidak sesuai dengan teori yang ada seperti amplop gaji dikarenakan proses penggajian pada pegawai sudah melalui transfer ke rekening masing-masing pegawai, dan prosedur yang digunakan hanya menggunakan 3 prosedur saja berbeda dengan teori yang ada 5 prosedur penggajian.

### 5.2 Saran

Berdasarkan dengan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan untuk dijadikan sebagai masukan bagi instansi sebagai berikut:

1. Fungsi pembuat daftar gaji, dapat dilakukan dengan salah satu dari bagian keuangan yang ditugaskan untuk menjadi fungsi pembuat daftar gaji serta pembayaran gaji serta pembayaran gaji dilakukan oleh bagian keuangan. Sehingga tidak akan terjadi perangkapan tugas yang dilakukan oleh bagian kepegawaian.
2. Sebaiknya dalam absensi *fingerprnt & Barcode*, pegawai yang datang terlambat dalam jam masuk kerja harus lebih meningkatkan lagi kedisiplinannya karena absensi karyawan ini digunakan sebagai bahan dasar untuk perhitungan penggajian. Sistem akuntansi penggajian pada Badan Pertanahan Nasional sudah baik mendukung pengendalian internal, namun juga perlu adanya pengawasan dalam absensi agar pegawai tidak lalai dalam tugasnya dan lebih disiplin dalam hal keterlambatan.
3. Sebaiknya dilakukan pemisahan tugas antara bagian kepegawaian dan bagian pembuat daftar gaji. Karena hal ini dapat memudahkan pembagian tugas dan memudahkan pengawasan, sehingga setiap pegawai mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan bagiannya sehingga data yang diolah atau dihasilkan nanti lebih akurat.
4. Sebaiknya dilakukan pengawasan secara berkala dalam proses pembuatan daftar gaji, untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam proses penggajian.
5. Apabila mesin pencatat waktu (*fingerprnt*) suatu saat mengalami kerusakan sebaiknya dilakukan pengawasan khusus, karena hal ini dapat menyebabkan kecurangan dalam pencatat waktu, sehingga dapat merugikan instansi karena memberikan gaji yang lebih atau kurang kepada pegawai.
6. Saran untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya perbanyak referensi teori mengenai sistem informasi akuntansi penggajian dan pengendalian internal sehingga dapat membandingkan dengan teori implementasi yang ada pada lapangan.

## Daftar Pustaka

Fibriyanti, Y. V. (2017). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dalam Rangka Efektivitas*

*Pengendalian Internal Perusahaan (Studi Kasus pada PT. Populer Sarana Medika, Surabaya). Volume II No. 1, Februari.*

Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart. (2016) *Sistem Informasi Akuntansi: Accounting Information Systems (Edisi 13)*, Prentice Hall.

Mulyadi.(2001). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Mulyadi.(2013). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Mulyadi.(2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Mulyadi.(2017). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Putra, A.( 2015). *Analisis Sistem Dan Pengendalian Intern Pembayaran Gaji Dan Upah Karyawan Pada PT. Bara Dinamika Muda Sukses Di Malinau*. eJournal Ilmu Administrasi Bisnis, 2015, 3 (1): 127-137. ISSN 2355-5408.

Romney M. B dan Paul J. S. (2006). *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat.

Silalahi, M. (2019). *Peranan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Penggajian Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist eISSN : 2599-1175 Volume 2, Nomor 2, 2019, 175 - 185 ISSN : 2599-0136.

Usry dan Hammer (1994) *Cost Accounting*. dialihbahasakan oleh Alfonsius Siraet dan Herman Wibowo. *Akuntansi Biaya, Perencanaan dan Pengendalian*. Penerbit Erlangga, Jakarta.